

Produktivitas, Investasi, dan Tantangan Pertumbuhan Jangka Menengah Indonesia



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Produktivitas, Investasi, dan Tantangan
Pertumbuhan Jangka Menengah Indonesia*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

27 March 2026

PRODUKTIVITAS, INVESTASI, DAN TANTANGAN PERTUMBUHAN JANGKA MENENGAH INDONESIA

Abstrak

Makalah ini membahas hubungan antara produktivitas, investasi, dan tantangan pertumbuhan jangka menengah Indonesia dalam konteks ambisi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil di kisaran 5 persen, walaupun menunjukkan ketahanan makroekonomi yang penting, belum cukup untuk menopang percepatan transformasi menuju negara berpendapatan tinggi. Data resmi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dari 5,03 persen pada 2024, dengan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta. Namun, dokumen perencanaan pemerintah untuk 2025–2029 menargetkan arah pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dengan kebutuhan investasi yang sebagian besar diproyeksikan berasal dari swasta/masyarakat sebesar 86,65 persen, pemerintah pusat dan daerah 7,22 persen, serta BUMN/D 6,13 persen. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang berada pada fase ketika stabilitas tidak lagi cukup; kualitas pertumbuhan, efisiensi investasi, dan produktivitas menjadi faktor penentu lintasan jangka menengah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam beberapa indikator, sinyal penguatan terlihat cukup jelas. Investasi yang tercermin dalam PMTB menjadi komponen pengeluaran dengan

pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV-2025, yakni 6,12 persen secara tahunan. Di sisi lain, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun, melampaui target Rp1.905,6 triliun dan meningkat 12,7 persen dibandingkan 2024. Namun, berbagai lembaga internasional tetap memproyeksikan pertumbuhan Indonesia hanya sekitar 4,8–5,1 persen dalam 2025–2027, tergantung waktu publikasi dan asumsi global masing-masing. World Bank pada Juni 2025 memperkirakan rata-rata pertumbuhan 2025–2027 sebesar 4,8 persen, sementara IMF pada Januari 2026 memperkirakan 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026. Fakta ini menunjukkan bahwa investasi yang meningkat belum otomatis menghasilkan akselerasi pertumbuhan yang signifikan. Dengan kata lain, persoalan utama Indonesia bukan semata kekurangan investasi, melainkan bagaimana memastikan investasi memiliki kandungan produktivitas yang tinggi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Makalah ini berargumen bahwa pertumbuhan jangka menengah Indonesia akan sangat ditentukan oleh tiga hal. Pertama, kemampuan mengubah investasi dari sekadar ekspansi kapasitas menjadi instrumen peningkatan produktivitas faktor-faktor produksi. Kedua, kemampuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, logistik, iklim usaha, dan tata kelola sehingga biaya ekonomi menurun. Ketiga, kemampuan menciptakan pekerjaan bernilai tambah tinggi agar pertumbuhan tidak hanya memperbesar output agregat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan riil rumah tangga. World Bank menilai bahwa meskipun ekonomi Indonesia tetap menciptakan pekerjaan bagi sebagian besar angkatan kerja baru, banyak pekerjaan tersebut berada pada sektor bernilai tambah rendah dan gagal membayar upah tingkat kelas menengah; bahkan antara 2018–2024, upah riil turun rata-rata 1,1 persen per tahun. Sementara itu, IMF menunjukkan bahwa investasi dan reformasi pada modal manusia serta logistik dapat menurunkan biaya perdagangan dan secara substansial meningkatkan ekspor serta output jangka menengah-panjang. Dengan

demikian, produktivitas menjadi simpul utama yang menghubungkan investasi dengan pertumbuhan berkelanjutan. ([World Bank](#))

Kata Kunci

produktivitas; investasi; pertumbuhan ekonomi; Indonesia; PMTB; reformasi struktural; modal manusia; logistik; RPJMN

1. Pendahuluan

Dalam studi pembangunan ekonomi, pertanyaan yang paling penting bukan lagi sekadar mengapa suatu negara dapat tumbuh, melainkan bagaimana negara tersebut dapat mempertahankan pertumbuhan yang cukup tinggi untuk mengubah struktur ekonominya. Sebuah perekonomian dapat tampak stabil, inflasi terkendali, fiskal disiplin, dan pertumbuhan bertahan di tingkat moderat. Namun, stabilitas itu tidak selalu identik dengan transformasi. Ia bisa saja hanya mencerminkan kemampuan bertahan, bukan kemampuan melompat. Indonesia hari ini berada tepat pada persimpangan seperti itu. Selama lebih dari dua dekade, pertumbuhan di kisaran 5 persen sering dipandang sebagai bukti resiliensi. Akan tetapi, ketika sasaran nasional bergerak ke arah negara maju dan berpendapatan tinggi, pertumbuhan 5 persen mulai tampak sebagai batas, bukan lagi prestasi akhir. Bappenas, melalui dokumen dan analisis kebijakan mutakhirnya, menempatkan fase 2025–2029 sebagai periode akselerasi, bukan sekadar kelanjutan pola lama.

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,11 persen, sedikit lebih tinggi dari 2024 yang sebesar 5,03 persen. PDB nominal mencapai Rp23.821,1 triliun, sementara PDB per kapita mencapai Rp83,7 juta atau sekitar USD 5.083,4. Dari sisi makro, ini adalah capaian yang layak diapresiasi, terutama karena berlangsung dalam lingkungan global yang penuh ketidakpastian. IMF bahkan menyebut

Indonesia tetap menjadi salah satu bright spot global, dengan pertumbuhan 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026 menurut proyeksi Januari 2026. Namun, justru karena pertumbuhan relatif stabil itulah pertanyaan yang lebih mendalam menjadi relevan: mengapa pertumbuhan yang stabil ini belum otomatis berubah menjadi lompatan menuju lintasan 7–8 persen? ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Pertanyaan tersebut membawa kita pada dua konsep sentral dalam ekonomi pembangunan: produktivitas dan investasi. Investasi selama ini sering diperlakukan sebagai mesin pertumbuhan utama, baik melalui pembangunan infrastruktur, ekspansi industri, hilirisasi, maupun pembentukan modal tetap bruto. Akan tetapi, investasi pada dirinya sendiri tidak menjamin lompatan pendapatan. Investasi yang salah arah, berbiaya tinggi, berorientasi jangka pendek, atau tidak didukung institusi yang baik dapat menghasilkan output yang terbatas. Sebaliknya, produktivitas berkaitan dengan kemampuan menggunakan modal, tenaga kerja, teknologi, dan organisasi secara lebih efisien untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Karena itu, investasi tanpa produktivitas dapat berujung pada pertumbuhan yang mahal, sedangkan produktivitas tanpa investasi juga sulit berkelanjutan. Pertumbuhan jangka menengah yang kuat memerlukan keduanya dalam hubungan yang saling menguatkan.

Makalah ini berangkat dari tesis bahwa tantangan pertumbuhan jangka menengah Indonesia bukan terutama terletak pada absennya investasi, melainkan pada kemampuan mengubah investasi menjadi produktivitas yang lebih tinggi. Tesis ini penting karena berbagai data menunjukkan bahwa arus investasi Indonesia justru menguat. Realisasi investasi 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan melampaui target tahunan. PMTB juga menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV-2025. Namun, lembaga-lembaga internasional masih melihat proyeksi pertumbuhan Indonesia ke depan berada di kisaran 4,8–5,1

persen. Kesenjangan antara kenaikan investasi dan keterbatasan proyeksi pertumbuhan inilah yang memerlukan pembacaan lebih kritis.

Pembahasan disusun dalam beberapa bagian. Pertama, dijelaskan landasan konseptual mengenai produktivitas, investasi, dan pertumbuhan jangka menengah. Kedua, dipaparkan potret terkini perekonomian Indonesia. Ketiga, dibahas mengapa produktivitas menjadi faktor kunci yang sering tertinggal dalam debat publik yang terlalu berfokus pada angka investasi. Keempat, dianalisis kualitas investasi Indonesia, termasuk kebutuhan untuk menggeser orientasi dari kuantitas ke efisiensi dan nilai tambah. Kelima, diuraikan tantangan jangka menengah, mulai dari kualitas sumber daya manusia, logistik, iklim usaha, struktur pekerjaan, hingga koordinasi kebijakan. Akhirnya, makalah ini menawarkan refleksi kebijakan bahwa Indonesia harus bergerak dari *growth by accumulation* menuju *growth by productivity*.

2. Kerangka Konseptual: Produktivitas, Investasi, dan Pertumbuhan Jangka Menengah

Produktivitas dalam pengertian paling dasar adalah kemampuan suatu perekonomian menghasilkan output yang lebih besar dari kombinasi input tertentu. Ia dapat diukur secara parsial, misalnya produktivitas tenaga kerja, atau secara lebih luas sebagai *total factor productivity*, yang menangkap efisiensi keseluruhan dalam penggunaan modal, tenaga kerja, teknologi, organisasi, dan pengetahuan. Dalam sejarah ekonomi, negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah bukan hanya menambah investasi, tetapi juga meningkatkan produktivitas melalui pendidikan, inovasi, kelembagaan, integrasi perdagangan, dan perubahan struktur sektoral. Karena itu, produktivitas adalah inti dari pertumbuhan jangka panjang, sedangkan investasi adalah salah satu kendaraan utamanya.

Dari sisi teori, investasi berperan menambah stok modal: mesin, bangunan, jalan, pelabuhan, pabrik, jaringan listrik, dan infrastruktur digital. Melalui investasi, kapasitas produksi meningkat. Tetapi ada satu persoalan penting. Bila investasi hanya menambah kapasitas tanpa memperbaiki cara ekonomi bekerja, maka pertumbuhan yang dihasilkan dapat cepat mencapai titik jenuh. Sebuah pabrik baru dapat meningkatkan output untuk beberapa saat, tetapi bila logistik mahal, tenaga kerja kurang terampil, pasokan energi tidak efisien, atau regulasi berubah-ubah, maka produktivitas pabrik tersebut tetap rendah. Dengan demikian, kualitas lingkungan ekonomi menjadi penentu seberapa besar investasi benar-benar berubah menjadi pertumbuhan.

Pertumbuhan jangka menengah berada di antara dinamika jangka pendek dan perubahan jangka panjang. Dalam horizon ini, pertumbuhan tidak lagi terutama ditentukan oleh stimulus sesaat atau fluktuasi komoditas, tetapi oleh kemampuan sebuah negara memperkuat fondasi strukturalnya. Itulah sebabnya pembahasan pertumbuhan jangka menengah hampir selalu bersentuhan dengan tema modal manusia, kualitas institusi, efisiensi birokrasi, logistik, keterbukaan, digitalisasi, dan iklim investasi. Dalam horizon lima sampai sepuluh tahun, negara yang tidak membenahi fondasi tersebut biasanya akan terjebak pada pertumbuhan moderat yang berulang.

Bagi Indonesia, kaitan antara produktivitas dan investasi makin penting karena ambisi pembangunan kini secara eksplisit lebih tinggi. Dokumen RPJMN 2025–2029 memproyeksikan kebutuhan investasi yang sangat besar dan mengarahkan pertumbuhan ke 8 persen. Dalam kerangka pembiayaannya, swasta/masyarakat diproyeksikan menjadi penyumbang utama 86,65 persen, sementara pemerintah pusat dan daerah 7,22 persen dan BUMN/D 6,13 persen. Ini berarti akselerasi pertumbuhan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan menarik, menjaga, dan mengarahkan

investasi swasta ke sektor-sektor yang memberi pengganda produktivitas tinggi, bukan sekadar memperbanyak proyek.

Dari sudut pandang pembangunan, hubungan produktivitas dan investasi dapat digambarkan dalam satu narasi sederhana. Bayangkan dua wilayah yang sama-sama menerima investasi besar. Wilayah pertama memperoleh jalan, pelabuhan, pelatihan tenaga kerja, sistem logistik yang efisien, kepastian perizinan, dan keterhubungan dengan pasar global. Wilayah kedua memperoleh bangunan fisik, tetapi dengan koordinasi lemah, biaya logistik tinggi, dan kualitas SDM terbatas. Keduanya mungkin sama-sama mencatat kenaikan investasi di atas kertas, tetapi hanya wilayah pertama yang memiliki peluang lebih besar untuk mengubah investasi menjadi pertumbuhan berkelanjutan. Di sinilah letak pelajaran penting bagi Indonesia: investasi harus dibaca bukan hanya dari besarnya, tetapi dari daya ungkit produktivitasnya.

3. Potret Terkini Perekonomian Indonesia

Potret terkini ekonomi Indonesia menunjukkan kombinasi antara kekuatan makro dan keterbatasan struktural. Pada 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen. Dari sisi pengeluaran tahunan, ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tertinggi 7,03 persen, sedangkan pada triwulan IV-2025 komponen PMTB tumbuh paling tinggi, yakni 6,12 persen secara tahunan. Ini menunjukkan bahwa investasi masih berperan penting sebagai penopang pertumbuhan, terutama pada paruh akhir tahun. Secara spasial, Pulau Jawa tetap mendominasi ekonomi nasional dengan kontribusi 56,93 persen terhadap PDB dan pertumbuhan 5,30 persen pada 2025. Dominasi ini penting untuk dicatat karena pertumbuhan Indonesia masih sangat terkonsentrasi secara geografis. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari perspektif lembaga internasional, perekonomian Indonesia dinilai tetap tangguh di tengah tekanan global. World Bank pada Juni 2025

mencatat bahwa PDB Indonesia tumbuh 4,9 persen pada triwulan I-2025 dan memproyeksikan rata-rata pertumbuhan 2025–2027 sebesar 4,8 persen. Pada Desember 2025, World Bank kembali menilai pertumbuhan Indonesia pada sembilan bulan pertama 2025 sebesar 5,0 persen dan memproyeksikan pertumbuhan tetap di kisaran itu hingga 2026–2027, dengan dukungan utama dari investasi dan net exports. IMF dalam Article IV yang diselesaikan Januari 2026 memperkirakan 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026. Ketiga bacaan ini konsisten dalam satu hal: Indonesia stabil, tetapi belum berada pada lintasan akselerasi tajam. ([World Bank](#))

Di sisi investasi, realisasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun, melampaui target Rp1.905,6 triliun dan naik 12,7 persen dibandingkan 2024. Data dan analisis kebijakan Bappenas menegaskan bahwa investasi tetap menjadi pilar utama agenda pembangunan, dan target investasi nasional untuk 2025–2029 mencapai Rp13.032 triliun. Dengan kata lain, negara tidak sedang kekurangan ambisi investasi. Bahkan, arah kebijakan pembangunan menempatkan investasi sebagai prasyarat untuk akselerasi menuju 8 persen. Persoalannya adalah apakah investasi yang besar itu memiliki komposisi, efisiensi, dan daya saing yang cukup untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia.

Dari sisi pasar tenaga kerja, gambaran Indonesia juga bersifat campuran. BPS melaporkan TPT Februari 2025 sebesar 4,76 persen dengan 145,77 juta penduduk bekerja dan rata-rata upah buruh Rp3,09 juta. Pada November 2025, TPT turun menjadi 4,74 persen dan rata-rata upah buruh naik menjadi Rp3,33 juta. Ini menunjukkan adanya perbaikan kuantitatif di pasar kerja. Namun, World Bank memberi peringatan penting: ekonomi memang menciptakan pekerjaan bagi sebagian besar pendatang baru di pasar kerja, tetapi banyak di antaranya berada di sektor bernilai tambah rendah, dan antara 2018 hingga 2024 upah riil justru turun rata-rata 1,1 persen per tahun. Artinya, problem Indonesia bukan lagi sekadar jumlah pekerjaan,

tetapi kualitas pekerjaan dan produktivitas yang menopang upah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Inilah konteks yang membuat tema produktivitas menjadi amat penting. Stabilitas makro tetap berharga, investasi tetap tumbuh, dan pengangguran terbuka relatif menurun. Tetapi jika produktivitas lemah, maka pertumbuhan akan menetap pada tingkat moderat, investasi hanya memberi hasil parsial, dan pasar kerja gagal menciptakan mobilitas ekonomi yang cukup kuat. Dalam horizon jangka menengah, ini adalah tantangan yang jauh lebih serius daripada fluktuasi kuartalan.

4. Produktivitas sebagai Sumber Pertumbuhan yang Menentukan

Jika pertumbuhan jangka pendek dapat didorong oleh konsumsi, belanja pemerintah, atau ledakan harga komoditas, pertumbuhan jangka menengah memerlukan mesin yang lebih dalam. Mesin itu adalah produktivitas. Produktivitas menjadi penting karena ia menentukan seberapa besar output yang dapat dihasilkan dari jumlah modal dan tenaga kerja yang sama. Ketika produktivitas naik, sebuah perekonomian tidak harus selalu mengandalkan penambahan buruh atau suntikan modal yang besar untuk tumbuh. Ia tumbuh karena menjadi lebih cerdas, lebih efisien, lebih terhubung, dan lebih terorganisasi.

Dalam konteks Indonesia, produktivitas menjadi kata kunci justru karena pertumbuhan selama ini relatif stabil tetapi tidak cukup cepat untuk mengejar target jangka menengah. Sebuah working paper Bappenas menegaskan bahwa pertumbuhan sekitar 5 persen yang selama ini dianggap cukup baik tidak lagi memadai untuk menopang ambisi Indonesia sebagai ekonomi yang sedang naik kelas. Dalam pembacaan itu, tantangan utama Indonesia bukanlah menghindari krisis, melainkan menemukan sumber pertumbuhan baru yang mampu mengangkat ekonomi ke lintasan yang lebih tinggi dan berkualitas. Penekanan pada

productivity-driven growth menjadi sangat penting karena ia menuntut perubahan orientasi dari sekadar mempertahankan stabilitas menuju memperbaiki efisiensi dan daya saing secara sistemik.

IMF memperkuat poin ini dari sudut pandang perdagangan dan integrasi global. Dalam *Selected Issues 2026*, IMF menyatakan bahwa di luar kebijakan perdagangan itu sendiri, reformasi struktural yang meningkatkan produktivitas—terutama investasi pada modal manusia dan logistik—dapat memperdalam integrasi perdagangan Indonesia. IMF juga menyebut bahwa peningkatan modal manusia dari persentil 25 ke persentil 75 dapat meningkatkan ekspor jasa sekitar 9 persen, sedangkan peningkatan pada logistik dan modal manusia yang mendekati median OECD dapat menurunkan biaya perdagangan dan mendukung ekspor lebih luas. Dalam simulasi reformasi dan integrasi perdagangan yang ambisius, output riil Indonesia dapat terdongkrak 4,1 persen pada horizon menengah-panjang dibandingkan baseline. Ini menunjukkan bahwa produktivitas bukan konsep abstrak; ia dapat diterjemahkan menjadi biaya yang lebih rendah, ekspor yang lebih kuat, dan output yang lebih besar. ([IMF](#))

Ada beberapa alasan mengapa produktivitas Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, struktur pertumbuhan Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi domestik. Ketika konsumsi menjadi jangkar utama, pertumbuhan cenderung stabil, tetapi tidak selalu cukup tinggi. Kedua, sebagian investasi masih belum sepenuhnya terhubung dengan peningkatan kemampuan teknologi, inovasi, dan peningkatan kualitas kerja. Ketiga, pasar tenaga kerja menciptakan banyak pekerjaan, tetapi sebagian besar pada sektor dengan nilai tambah rendah. Keempat, kesenjangan kualitas infrastruktur, logistik, dan institusi antarwilayah membuat produktivitas nasional tidak seragam.

Secara naratif, produktivitas dapat dijelaskan melalui contoh sederhana. Bayangkan dua perusahaan manufaktur yang menerima investasi mesin baru. Perusahaan pertama juga melatih pekerjanya, menggunakan sistem

manajemen produksi yang baik, terkoneksi dengan pemasok yang efisien, dan memiliki akses pasar ekspor. Perusahaan kedua hanya membeli mesin, tetapi pekerjanya tidak cukup terampil, pasokan bahan baku sering terlambat, listrik dan logistik mahal, serta izin usaha berbelit. Meskipun investasi fisiknya mirip, hasil akhirnya berbeda jauh. Perusahaan pertama meningkatkan output, kualitas, dan ekspor. Perusahaan kedua hanya menambah kapasitas secara terbatas. Di tingkat nasional, perekonomian tumbuh cepat bila lebih banyak perusahaan menyerupai yang pertama.

Karena itu, produktivitas seharusnya diperlakukan sebagai indikator keberhasilan pembangunan, bukan sekadar hasil sampingan. Working paper Bappenas bahkan menyarankan bahwa produktivitas perlu dijadikan indikator utama, bukan hanya pertumbuhan PDB agregat. Ini adalah usulan yang sangat penting. PDB dapat tumbuh karena banyak hal, termasuk belanja dan harga komoditas. Tetapi bila produktivitas tidak meningkat, pertumbuhan akan cenderung mudah melambat kembali. Sebaliknya, bila produktivitas menjadi pusat perhatian kebijakan, maka investasi, pendidikan, logistik, industri, dan reformasi kelembagaan dapat diarahkan secara lebih terintegrasi.

5. Investasi: Dari Kuantitas ke Kualitas

Dalam banyak diskursus kebijakan, investasi sering diperlakukan sebagai jawaban otomatis atas perlambatan pertumbuhan. Logika ini memang memiliki dasar kuat: tanpa investasi, kapasitas produksi sulit bertambah, infrastruktur tidak berkembang, dan industrialisasi tertahan. Namun, pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa kuantitas investasi saja tidak cukup. Yang menentukan adalah kualitas investasi, yaitu apakah investasi tersebut menciptakan efek pengganda yang kuat, meningkatkan efisiensi, memicu pembelajaran teknologi, memperluas basis ekspor, dan menghasilkan pekerjaan bernilai tambah tinggi.

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan realisasi investasi yang signifikan. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun, melampaui target Rp1.905,6 triliun. Pencapaian ini penting karena menunjukkan bahwa Indonesia tetap memiliki daya tarik investasi di tengah lingkungan global yang sulit. Selain itu, PMTB menjadi komponen pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV-2025 sebesar 6,12 persen secara tahunan. Artinya, dari sisi akumulasi modal, perekonomian Indonesia masih bergerak. Namun, data dan proyeksi lembaga internasional yang menempatkan pertumbuhan Indonesia tetap di sekitar 5 persen memperlihatkan bahwa kenaikan investasi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi lompatan pertumbuhan. Di sinilah pertanyaan tentang kualitas menjadi krusial.

Kualitas investasi dapat dibaca dari setidaknya lima dimensi.

Pertama, orientasi sektoral. Investasi yang masuk ke sektor bernilai tambah rendah atau terlalu bergantung pada ekstraksi tanpa upgrading teknologi cenderung menghasilkan pertumbuhan jangka pendek yang terbatas. Sebaliknya, investasi yang masuk ke manufaktur berteknologi menengah, logistik modern, infrastruktur digital, energi yang efisien, dan sektor jasa produktif cenderung memberi efek yang lebih luas.

Kedua, keterkaitan domestik. Investasi yang terhubung dengan pemasok lokal, pendidikan vokasi, UMKM, dan rantai nilai domestik akan menghasilkan pengganda yang lebih tinggi daripada investasi yang terisolasi sebagai enclave.

Ketiga, efisiensi proyek. Proyek yang lambat, mahal, dan penuh ketidakpastian regulasi dapat menyerap sumber daya besar tetapi menghasilkan output produktif yang kecil.

Keempat, dampak pada kualitas kerja. Investasi berkualitas bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga pekerjaan yang memberi keterampilan, mobilitas pendapatan, dan pembelajaran.

Kelima, keberlanjutan. Investasi yang mengabaikan risiko sosial-lingkungan dapat menghasilkan pertumbuhan semu dan biaya jangka panjang yang besar.

Dokumen RPPLN 2025–2029 menarik untuk dicermati karena menekankan bahwa kebutuhan investasi periode ini sangat besar, tetapi pembiayaannya harus bertumpu terutama pada swasta/masyarakat. Dokumen itu juga menyebut sektor-sektor prioritas seperti swasembada pangan, air, energi, infrastruktur pendukung hilirisasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini berarti pemerintah sendiri memahami bahwa investasi yang dibutuhkan bukan investasi generik, melainkan investasi yang memiliki fungsi transformasional. Lebih jauh, kriteria ekonomi dan finansial yang digunakan dalam penilaian proyek pinjaman luar negeri mencakup multiplier effect, kelayakan ekonomi, dan potensi pengembangan kerja sama ekonomi. Dengan demikian, orientasi pada kualitas sebenarnya sudah muncul dalam desain kebijakan, tetapi implementasinya harus jauh lebih konsisten.

Bappenas dalam working paper mengenai daya saing investasi juga menegaskan bahwa keberlanjutan daya saing investasi Indonesia sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas institusi dan kepastian kebijakan, bukan semata oleh besaran realisasi investasi. Pernyataan ini sangat penting. Negara dapat membanggakan angka investasi yang besar, tetapi bila investor menghadapi inkonsistensi regulasi, lemahnya penegakan aturan, atau koordinasi yang berlarut, maka investasi tersebut bisa kurang produktif atau tidak berkelanjutan. Dalam perspektif jangka menengah, kualitas institusi adalah bagian dari kualitas investasi itu sendiri.

6. Tantangan Pertumbuhan Jangka Menengah Indonesia

6.1. Pertumbuhan 5 persen: stabil tetapi belum cukup

Salah satu tantangan utama Indonesia adalah mental model kebijakan yang masih cukup nyaman dengan pertumbuhan 5 persen. Dalam kondisi tertentu, 5 persen memang tampak baik: lebih tinggi dari banyak negara, relatif stabil, dan didukung inflasi yang terkendali. Namun, bila dikaitkan dengan ambisi keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mengejar Indonesia Emas 2045, pertumbuhan itu mulai terlihat kurang memadai. Working paper Bappenas dengan tegas menyebut bahwa pertumbuhan 5 persen tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan struktural Indonesia. Dengan pertumbuhan moderat semacam itu, penciptaan lapangan kerja berkualitas berlangsung lebih lambat, ruang fiskal terbatas, dan konvergensi ke pendapatan tinggi menjadi semakin panjang.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena RPJMN 2025–2029 menargetkan arah pertumbuhan 8 persen. Target tersebut jelas ambisius, tetapi ia sekaligus mencerminkan kesadaran bahwa pola pertumbuhan lama tidak cukup. Dengan kata lain, tantangan jangka menengah Indonesia bukan hanya mempertahankan pertumbuhan, melainkan mengubah kualitas mesin pertumbuhan itu sendiri. Bila produktivitas, kualitas kerja, dan efisiensi investasi tidak meningkat, maka target 8 persen akan tetap menjadi aspirasi di atas kertas.

6.2. Modal manusia dan kualitas tenaga kerja

Tantangan kedua adalah kualitas sumber daya manusia. Investasi fisik, industri, dan infrastruktur tidak dapat menghasilkan output maksimal tanpa tenaga kerja yang cukup terampil. IMF menempatkan modal manusia sebagai salah satu reform priority utama, dan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas modal manusia berpotensi besar mendukung ekspor jasa modern, menurunkan biaya perdagangan secara efektif, dan memperluas keunggulan komparatif Indonesia. Dalam dunia ekonomi yang makin padat teknologi dan jasa modern, kualitas tenaga kerja tidak lagi hanya memengaruhi produktivitas individu, tetapi juga menentukan daya saing nasional. ([IMF](#))

Kaitan antara produktivitas dan kualitas tenaga kerja juga terlihat dari pasar kerja Indonesia. BPS menunjukkan bahwa pengangguran terbuka relatif rendah dan jumlah orang bekerja besar. Namun, World Bank menegaskan bahwa banyak pekerjaan baru tercipta di sektor bernilai tambah rendah dan gagal memberikan upah kelas menengah. Bahkan, upah riil tercatat menurun rata-rata 1,1 persen per tahun pada 2018–2024. Ini menandakan adanya gap antara penyerapan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. Bila ekonomi menyerap pekerja tetapi ke sektor berproduktivitas rendah, maka pertumbuhan dapat tetap terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang memadai. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

6.3. Logistik, biaya perdagangan, dan konektivitas

Tantangan ketiga adalah logistik dan biaya perdagangan. Sebuah ekonomi kepulauan seperti Indonesia membutuhkan sistem konektivitas yang efisien untuk menurunkan biaya distribusi, menghubungkan pasar domestik, dan memperluas ekspor. IMF secara eksplisit menempatkan logistik sebagai bidang reformasi yang sangat penting. Analisisnya menunjukkan bahwa perbaikan logistik dapat membantu menurunkan biaya perdagangan dan sangat mendukung ekspor barang, sementara perbaikan modal manusia memberi dorongan besar pada ekspor jasa. Bagi Indonesia, pesan ini sangat penting: produktivitas tidak hanya ditentukan oleh pabrik dan pekerja, tetapi juga oleh kemampuan barang, input, dan informasi bergerak dengan cepat dan murah. ([IMF](#))

Masalah logistik juga berkaitan dengan ketimpangan wilayah. Data BPS yang menunjukkan dominasi Jawa lebih dari separuh PDB nasional menandakan bahwa pusat pertumbuhan masih sangat terpusat. Selama konektivitas antarpulau, logistik kawasan, dan jaringan industri luar Jawa belum cukup kuat, maka produktivitas nasional akan tetap berat sebelah. Akibatnya, investasi di luar pusat-pusat utama menghadapi biaya lebih tinggi dan risiko lebih besar. Pertumbuhan jangka menengah Indonesia karenanya memerlukan strategi logistik yang tidak hanya efisien secara

ekonomi, tetapi juga menyatukan ruang produksi nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

6.4. Iklim usaha, kepastian kebijakan, dan tata kelola

Tantangan keempat adalah iklim usaha dan kualitas institusi. Dalam banyak kasus, masalah utama bukan kekurangan insentif, melainkan ketidakpastian aturan, perizinan yang berubah-ubah, koordinasi yang lambat, dan lemahnya penegakan kebijakan. Bappenas menekankan bahwa daya saing investasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas institusi dan kepastian kebijakan. IMF juga menempatkan governance, business climate, dan investment climate sebagai prioritas reformasi. Sementara World Bank menilai deregulasi, reformasi bisnis, perdagangan, dan digital dapat membantu Indonesia menavigasi risiko global dan mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Semua ini menegaskan satu hal: produktivitas adalah hasil ekonomi dari institusi yang bekerja.

Di tingkat mikro, kualitas institusi menentukan biaya sehari-hari dunia usaha. Seorang investor tidak hanya menghitung upah dan pajak, tetapi juga waktu perizinan, kepastian kontrak, reliabilitas listrik, kualitas pengadilan, dan konsistensi kebijakan pusat-daerah. Bila unsur-unsur ini lemah, maka biaya implisit investasi meningkat. Secara statistik, realisasi investasi mungkin tetap besar, tetapi secara produktif hasilnya kurang maksimal. Karena itu, reformasi institusi bukan hanya agenda tata kelola; ia adalah agenda produktivitas.

6.5. Struktur pekerjaan dan kualitas pertumbuhan

Tantangan kelima adalah struktur pekerjaan. Banyak negara berkembang berhasil menaikkan pertumbuhan untuk beberapa waktu, tetapi gagal menghasilkan mobilitas sosial yang cukup karena pekerjaan yang tercipta terlalu informal, terlalu rendah produktivitasnya, atau tidak memberi ruang pembelajaran. World Bank menilai masalah ini juga terjadi di Indonesia: ekonomi menciptakan pekerjaan bagi banyak pendatang baru di pasar

kerja, namun mayoritas masih berada di sektor bernilai tambah rendah. Ini berarti pertumbuhan belum sepenuhnya berubah menjadi better jobs. Bila struktur ini bertahan, maka konsumsi rumah tangga dapat tetap tumbuh, tetapi kelas menengah produktif tidak membesar secepat yang dibutuhkan. ([World Bank](#))

Secara sosial, persoalan ini sangat penting. Rumah tangga dapat merasa ekonomi bertumbuh, tetapi tetap sulit naik kelas. Pekerjaan tersedia, tetapi upah stagnan. Aktivitas ekonomi ramai, tetapi produktivitas rendah. Dalam jangka menengah, keadaan seperti itu berisiko menahan transformasi struktural karena dunia usaha tidak didorong cukup kuat untuk naik ke kegiatan bernilai tambah lebih tinggi. Pada akhirnya, Indonesia dapat terjebak pada kombinasi pertumbuhan moderat, pekerjaan banyak tetapi kurang produktif, dan investasi yang besar tetapi tidak memberi lompatan pendapatan.

6.6. Ketergantungan pada mesin pertumbuhan lama

Tantangan keenam adalah ketergantungan pada mesin pertumbuhan lama: konsumsi domestik, ekspor komoditas, dan stimulus sesaat. Working paper Bappenas menegaskan bahwa lingkungan global tidak lagi memberi dorongan sekuat masa lalu, sementara pertumbuhan 5 persen yang terlalu bergantung pada konsumsi domestik menjadi semakin rapuh. Kondisi ini menuntut sumber pertumbuhan baru yang lebih produktif, lebih kompetitif, dan lebih terintegrasi dengan perubahan ekonomi global. Artinya, Indonesia harus bergerak ke arah industrial deepening, jasa modern, digitalisasi produktif, hilirisasi cerdas, dan integrasi rantai nilai global yang lebih berkualitas.

7. Produktivitas dan Investasi dalam Narasi Pembangunan Indonesia

Untuk memahami hubungan antara produktivitas dan investasi secara lebih konkret, bayangkan satu kawasan industri baru dibangun di luar Jawa. Jalan masuk diperbaiki, pelabuhan dihubungkan, jaringan listrik diperluas, dan insentif investasi diumumkan. Dalam tahap awal, angka investasi melonjak. Tetapi dua tahun kemudian, muncul masalah: tenaga kerja lokal belum siap, pelatihan minim, bahan baku masih harus datang dari lokasi jauh dengan ongkos tinggi, koordinasi izin lingkungan berbelit, dan perusahaan akhirnya hanya beroperasi di bawah kapasitas. Dalam statistik nasional, investasi telah tercatat. Namun dalam kenyataan ekonomi, produktivitas belum benar-benar naik.

Sekarang bayangkan skenario yang berbeda. Kawasan industri yang sama dibangun bersamaan dengan sekolah vokasi yang relevan, digitalisasi logistik, integrasi pemasok lokal, kepastian lahan, one-stop service yang berjalan, dan dukungan ekspor. Dalam situasi ini, investasi fisik tidak berdiri sendiri. Ia dikelilingi oleh ekosistem produktivitas. Perusahaan bukan hanya datang, tetapi bertahan, berinovasi, dan memperbesar skala. Pekerja bukan hanya terserap, tetapi naik keterampilannya. Rantai pasok lokal bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari produksi. Dalam skenario kedua inilah investasi menjadi penggerak pertumbuhan jangka menengah yang sesungguhnya.

Narasi ini penting karena sering kali kebijakan publik terjebak pada logika pencapaian jangka pendek: seberapa besar realisasi investasi, berapa proyek yang diresmikan, dan berapa banyak tenaga kerja terserap. Semua itu penting, tetapi belum cukup. Indonesia kini memerlukan ukuran keberhasilan yang lebih dalam: apakah investasi itu menurunkan biaya ekonomi, menaikkan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki ekspor bernilai tambah, memperkuat basis inovasi, dan menciptakan pekerjaan yang meningkatkan upah riil. Tanpa ukuran-ukuran itu, pertumbuhan mudah tampak sibuk tetapi tidak benar-benar maju.

8. Arah Kebijakan: Dari Stabilitas menuju Akselerasi Produktif

8.1. Menjadikan produktivitas sebagai pusat kebijakan

Arah pertama yang paling penting adalah menjadikan produktivitas sebagai pusat perumusan kebijakan ekonomi. Ini berarti kebijakan fiskal, industri, pendidikan, perdagangan, dan investasi perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan serapan anggaran atau besaran proyek, tetapi berdasarkan pengaruhnya terhadap efisiensi dan nilai tambah. Usulan Bappenas agar produktivitas dijadikan indikator utama pembangunan sangat layak dipertimbangkan secara serius. Dengan pendekatan ini, pertanyaan kebijakan berubah dari “berapa banyak yang dibangun?” menjadi “seberapa besar yang dibangun itu meningkatkan kapasitas produktif ekonomi?”.

8.2. Menggeser fokus investasi dari volume ke efek pengganda

Arah kedua adalah menggeser fokus investasi dari volume ke efek pengganda. Realisasi investasi yang besar tetap penting, tetapi kualitas sektoral, spillover teknologi, dan keterkaitan domestik harus menjadi fokus utama. RPPLN 2025–2029 sudah memberi sinyal bahwa prioritas perlu diarahkan ke pangan, air, energi, infrastruktur pendukung hilirisasi, dan kualitas SDM. Langkah berikutnya adalah memastikan proyek-proyek dalam sektor itu benar-benar dinilai berdasarkan multiplier effect ekonomi, bukan hanya penyerapannya terhadap pembiayaan.

8.3. Mempercepat investasi pada modal manusia

Arah ketiga adalah mempercepat investasi pada modal manusia. Analisis IMF menunjukkan bahwa perbaikan human capital memberi dampak nyata terhadap ekspor jasa dan penurunan biaya perdagangan efektif. Dalam konteks Indonesia, ini berarti pendidikan, pelatihan vokasi, keterampilan digital, kemampuan analitis, dan pembelajaran sepanjang hayat harus dianggap sebagai bagian dari strategi pertumbuhan, bukan sekadar

kebijakan sosial. Negara yang ingin keluar dari jebakan pertumbuhan moderat harus menghasilkan tenaga kerja yang tidak hanya banyak, tetapi produktif. ([IMF](#))

8.4. Menurunkan biaya logistik dan memperkuat konektivitas

Arah keempat adalah menurunkan biaya logistik dan memperkuat konektivitas nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak dapat berharap produktivitas naik bila distribusi masih mahal dan lambat. Karena itu, investasi infrastruktur harus dihubungkan dengan integrasi pasar domestik, efisiensi pelabuhan, konektivitas kawasan industri, dan dukungan terhadap ekspor. Perbaikan logistik, menurut IMF, bukan hanya membantu ekspor barang, tetapi juga berfungsi sebagai reformasi lintas-sektor yang memperluas manfaat dari liberalisasi perdagangan dan investasi. ([IMF](#))

8.5. Menciptakan iklim usaha yang lebih dapat diprediksi

Arah kelima adalah menciptakan iklim usaha yang lebih dapat diprediksi. Kepastian kebijakan, penegakan aturan, koordinasi lintas level pemerintahan, dan kualitas birokrasi merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi yang tak kalah penting dari jalan dan pelabuhan. World Bank menyebut business environment, deregulation, trade reform, dan digital reform sebagai pendorong potensial yang dapat membantu pertumbuhan Indonesia mendekati 5,5 persen pada 2027. Bappenas juga menekankan bahwa daya saing investasi sangat ditentukan oleh institusi. Maka, agenda reformasi kelembagaan harus diperlakukan sebagai agenda pertumbuhan, bukan hanya agenda administratif. ([World Bank](#))

8.6. Menautkan pertumbuhan dengan pekerjaan berkualitas

Arah keenam adalah menautkan pertumbuhan dengan penciptaan pekerjaan berkualitas. Indonesia tidak cukup hanya menciptakan pekerjaan; Indonesia harus menciptakan pekerjaan yang memberi produktivitas dan upah lebih baik. Temuan World Bank tentang rendahnya kualitas banyak

pekerjaan baru dan penurunan upah riil harus dibaca sebagai alarm kebijakan. Investasi yang tidak menghasilkan better jobs pada akhirnya akan membatasi perluasan kelas menengah dan menahan pertumbuhan permintaan berkualitas di dalam negeri. ([World Bank](#))

8.7. Memperdalam integrasi perdagangan dan rantai nilai

Arah ketujuh adalah memperdalam integrasi perdagangan dan rantai nilai global. IMF menunjukkan bahwa integrasi perdagangan yang lebih dalam, ditambah reformasi struktural dalam logistik dan modal manusia, dapat meningkatkan level GDP riil 4,1 persen pada jangka menengah-panjang. Ini memberikan pesan kuat bahwa Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada pasar domestik yang besar. Pasar domestik adalah kekuatan, tetapi untuk lompatan produktivitas, Indonesia juga perlu terhubung lebih efektif ke arus teknologi, pasar, dan investasi global. ([IMF](#))

9. Penutup

Produktivitas, investasi, dan pertumbuhan jangka menengah Indonesia berada dalam satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Investasi dibutuhkan untuk memperbesar kapasitas, memperbaiki infrastruktur, dan membuka peluang industrialisasi. Namun, tanpa kenaikan produktivitas, investasi hanya akan menghasilkan pertumbuhan moderat yang mahal dan mudah kehilangan tenaga. Produktivitas memberi arti pada investasi; ia mengubah penambahan modal menjadi penurunan biaya, kualitas output yang lebih baik, ekspor yang lebih kuat, dan upah yang lebih tinggi. Karena itu, pertumbuhan jangka menengah Indonesia akan sangat bergantung pada keberhasilan menghubungkan keduanya.

Data terkini memberi gambaran yang cukup jelas. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, investasi tetap kuat, dan realisasi penanaman modal melampaui target. Tetapi berbagai proyeksi

internasional masih menempatkan pertumbuhan Indonesia ke depan di sekitar 5 persen. Di saat yang sama, pemerintah menargetkan arah pertumbuhan 8 persen dalam RPJMN 2025–2029, dan kebutuhan investasinya bertumpu terutama pada swasta/masyarakat. Kesenjangan antara kinerja aktual dan ambisi kebijakan ini tidak dapat dijembatani hanya dengan menambah proyek. Ia memerlukan produktivitas yang lebih tinggi, reformasi yang lebih konsisten, dan investasi yang lebih berkualitas. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari seluruh pembahasan, terdapat satu pelajaran utama. Indonesia bukan kekurangan alasan untuk optimistis, tetapi optimisme itu harus berbasis pada transformasi, bukan semata pada stabilitas. Stabilitas makro perlu dipertahankan, namun ia harus dijadikan pijakan untuk akselerasi. Produktivitas harus menjadi bahasa baru kebijakan pembangunan. Artinya, investasi harus diukur dari dampaknya terhadap efisiensi, logistik harus dibaca sebagai agenda pertumbuhan, modal manusia harus diperlakukan sebagai aset strategis, dan iklim usaha harus diorientasikan pada kepastian jangka panjang. Jika langkah-langkah itu berhasil dijalankan, maka Indonesia tidak hanya akan mempertahankan pertumbuhan, tetapi juga mengubah kualitas pertumbuhannya. Itulah inti tantangan jangka menengah Indonesia: bukan sekadar tumbuh, melainkan tumbuh dengan cara yang membuat kemajuan menjadi berkelanjutan.

Glosarium

Akselerasi pertumbuhan

Proses peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari tingkat moderat menuju tingkat yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Efek pengganda (multiplier effect)

Dampak lanjutan dari suatu investasi atau kebijakan yang menimbulkan kenaikan aktivitas ekonomi lebih besar daripada nilai awal intervensi.

Human capital / modal manusia

Kapasitas produktif manusia yang terbentuk melalui pendidikan, keterampilan, kesehatan, pengalaman, dan kemampuan belajar.

Iklim investasi

Keseluruhan kondisi ekonomi, institusional, regulatif, dan infrastruktur yang memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal.

Jebakan pendapatan menengah

Situasi ketika sebuah negara berhasil keluar dari kemiskinan rendah tetapi mengalami kesulitan untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi karena produktivitas dan inovasi melambat.

Logistik

Sistem pengangkutan, penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan arus barang serta informasi dalam perekonomian.

Nilai tambah

Kenaikan nilai ekonomi suatu barang atau jasa setelah melalui proses produksi, pengolahan, distribusi, atau inovasi.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen PDB dari sisi pengeluaran yang menggambarkan investasi fisik, seperti pembangunan bangunan, mesin, peralatan, dan aset tetap lainnya.

([BPS API](#))

Produktivitas

Kemampuan menghasilkan output lebih besar dari input tertentu; dapat merujuk pada produktivitas tenaga kerja atau produktivitas total faktor.

Produktivitas tenaga kerja

Jumlah output yang dihasilkan oleh setiap pekerja atau setiap jam kerja.

Reformasi struktural

Perubahan kebijakan dan kelembagaan yang bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi jangka menengah-panjang, seperti perbaikan logistik, pendidikan, persaingan usaha, dan tata kelola.

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dokumen perencanaan lima tahunan pemerintah Indonesia.

Total factor productivity (TFP)

Komponen pertumbuhan yang berasal dari peningkatan efisiensi keseluruhan dalam penggunaan modal dan tenaga kerja, sering dikaitkan dengan teknologi, manajemen, dan institusi.

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2025, May 5). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen. Rata-rata upah buruh sebesar 3,09 juta rupiah.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *November 2025: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,74 persen dan rata-rata upah buruh sebesar 3,33 juta rupiah.* ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri (RPPLN) 2025–2029.*

Bappenas Working Papers. (2026). *Mengurai daya saing investasi Indonesia: Peran institusi, kepastian kebijakan, dan reformasi regulasi dalam era transisi ekonomi global.*

Bappenas Working Papers. (2026). *Tahun 2026 dan transisi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi: Outlook ekonomi berbasis produktivitas.*

International Monetary Fund. (2026, January 21). *IMF Executive Board concludes 2025 Article IV consultation with Indonesia.* ([IMF](#))

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: Selected issues (IMF Country Report No. 26/011).* ([IMF](#))

World Bank. (2025, June 23). *Indonesia's economy remains resilient despite global headwinds.* ([World Bank](#))

World Bank. (2025, December 17). *Indonesia's economy maintains resilience amid global uncertainty.* ([World Bank](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Produktivitas, Investasi, dan Tantangan
Pertumbuhan Jangka Menengah Indonesia*

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 27 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c5f6e6-f7e4-839d-a23f-962e94f041a5>